

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dilihat dari Keamanan data (80%), Waktu (80%), Ketelitian (80%), Variasi laporan atau Output (80%), Relevansi (76%), dimana rata-rata jawaban responden untuk efektivitas sistem informasi adalah 79,2% dan termasuk dalam ketegori Efektif (E).
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah (1) Sumber Daya Manusia pada OPD yang belum memadai dari sisi kualitas (2) Sarana prasarana yang kurang memadai, (3) Kurangnya pelatihan/bimbingan teknik dalam penerapan aplikasi SIPKD sehingga pemahaman para pegawai terhadap keuangan daerah belum di implementasikan sepenuhnya dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (4) Penggunaan aplikasi SIPKD masih sangat terbatas yakni hanya berpusat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten flores Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu memberikan pelatihan terhadap semua yang terlibat dalam menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk lebih meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusianya dalam melakukan proses pengoperasian SIPKD seperti pelaporan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan dan keterhambatan dalam penginputan data.
2. Meningkatkan sarana prasarana guna mencegah keterhambatan dalam penginputan data dan lain sebagainya.
3. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebaiknya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada semua pegawai terkait aplikasi SIPKD kurang lebih 6 bulan sekali agar pemahaman mereka terkait SIPKD ini semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, Geoge H. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bagoe, Femi. 2013. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo, Jurusan Akuntansi*. <http://kim.ung.ac.id/indeks.php/KIMFEB/article/download/2047/2026>. Dilihat pada tanggal 21 Maret 2019.
- Books, TM. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Davis, Gordon.B. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Dewi, P.Ayu Ratna. 2013. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan, Jurusan Akuntansi*. Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019.
- Handoko. T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Jogiyanto. 2009. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kusufi dan Abdul Halim. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kwary, Deny Arnos. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamesah.D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Malayu Hasibuan.S.P.2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyani, Sri. 2016. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*

Romney, Marshall. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Indeks.
Supriyono.R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPF

Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD, *tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD* Surat Edaran Mendagri Nomor 900.806.BAKD, SE.900.360. BAKD tentang Implementasi SIPKD.

Sutabri, Tata. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah*, Jakarta.

Utami, Dian Arlupi. *Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Gresik, Jurusan Akuntansi*. Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019.

Wasja. 2015. *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Instansi Pemerintah Daerah, Jurusan Akuntansi*.<http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFEB/article/download/2047/2026> Dilihat pada tanggal 19 Mei 2019 www.djkd.kemendagri.go.id